

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu keseluruhan usaha mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum, dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik struktural formal, serta informal dan nonformal dalam suatu sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, yang senantiasa harus mendapat perhatian untuk ditumbuhkembangkan agar benar-benar dirasakan dan dapat memberikan manfaat bagi proses pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan Negara.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan perlu dilakukan berbagai perubahan berupa pengembangan dan perbaikan proses pelaksanaan pendidikan tersebut, baik sarana maupun fasilitas yang diberikan. Memahami pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Melalui pendidikan yang dikelola dengan profesional diharapkan dapat mencapai sasaran yang hakiki. Selain itu, melalui pendidikan manusia dapat membangun kesejahteraan dunia akhirat. Oleh karena itu, pendidikan terutama pada anak-anak menuntut segala kekuatan kodrat yang ada sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹

Dari pendapat di atas, muncullah suatu teori yang aksiomatik bahwa maju tidaknya suatu bangsa sangat bergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan dapat menghasilkan manusia berkualitas lahir dan batin, otomatis bangsa itu akan maju, damai dan tenteram. Sebaliknya, jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang yang akibat fatalnya akan melahirkan instabilitas, distorsi dan dehumanisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

¹Made Pidarta, *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 10.

Melalui pendidikan program mencerdaskan bangsa dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Segala kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan dan kemajuan pendidikan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.² Berkaitan dengan itu, pemerintah selalu menekankan arti pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara melalui proses belajar dan mengajar. Melihat pentingnya pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari kehadiran berbagai institusi pendidikan dengan peran dan aktifitasnya masing-masing.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai komponen di antaranya komponen guru, komponen peserta didik, komponen pengelolaan, dan komponen pembiayaan. Keseluruhannya saling berkaitan satu sama lainnya dan sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 19 tentang standar proses dan pasal 55 mengenai standar pengelolaan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien diperlukan kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut hasil pengawasan.³

Tugas ini dipercayakan kepada pengawas satuan pendidikan bertanggung jawab membina, memantau, dan menilai satuan pendidikan. Salah satu standar yang memegang peran penting dalam melaksanakan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan terdiri atas guru, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan

²Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu* (Jakarta: Nimas Multima, 2005), h. 54.

³Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang -Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007), h. 22.

pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboratorium, teknisi sumber belajar dan penguji.⁴

Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar dan kualitas dari guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya.

Usaha untuk menciptakan guru yang profesional, pemerintah telah membuat aturan persyaratan untuk menjadi guru. Dalam pasal 8 Undang Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun dalam kenyataannya masih sedikit guru yang memenuhi syarat tersebut.

Guru berada pada titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitas. Setiap usaha pendidikan seperti penggantian kurikulum, pengembangan metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti jika melibatkan guru. Selain itu guru diposisikan sebagai garda terdepan di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar karena guru memegang posisi yang sangat strategis dalam upaya menciptakan lulusan yang kompeten dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang profesional. Oleh karena itu, maka kualitas dan kuantitas guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

Peningkatan kinerja guru akan berpengaruh pada peningkatan kualitas output Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan lulusan sering kali dipandang tergantung kepada peran guru dalam pengelolaan komponen-komponen pengajaran yang digunakan dalam proses

⁴Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management Analisis Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 817.

belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal tentunya guru harus memiliki dan menampilkan kinerja yang maksimal selama proses belajar mengajar dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesionalitas dan kualitas kerja para guru tersebut merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Profesionalitas dan kualitas kerja para guru juga merupakan indikasi dari adanya komitmen guru terhadap sekolah sebagai suatu organisasi tempatnya mengajar, sehingga dapat dikatakan seorang guru yang memiliki komitmen terhadap sekolah tempatnya mengajar akan berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Selain guru, kebijakan penyelenggara pendidikan juga sangat memiliki kedudukan strategis dan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan lembaga pendidikan bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru sehingga proses pendidikan akan berlangsung dengan baik.

Sebagai penyelenggara langsung pendidikan di sekolah, guru membutuhkan bantuan dan bimbingan. Guru merupakan personal sekolah selalu berhadapan dengan berbagai hal di mana dirinya tidak dapat memecahkan masalah secara menyeluruh tanpa mendapat bantuan dari pihak lainnya, terutama dari kebijakan pemerintah. Guru selalu berhadapan dengan situasi yang setiap saat berubah, seperti kurikulum, tuntutan masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan sebagainya. Hal tersulit yang dihadapi guru adalah menghadapi perubahan tuntutan masyarakat, yaitu tuntutan terhadap perubahan yang cukup deras dari masyarakat sehingga membutuhkan perubahan. Dalam kondisi ini guru membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Guru dalam melaksanakan tugasnya dan upaya meingkatkan kinerjanya, banyak faktor yang menjadi penghambatnya. Untuk itu perlu pembinaan yang kontiniu dan berkesinambungan dengan program yang terarah dan sistematis terhadap para guru di sekolah, hal ini lebih diperlukan lagi dalam rangka

mengimplementasikan berbagai paradigma pendidikan baru, seperti manajemen berbasis sekolah/madrasah, program pembinaan guru dan personil yang biasa disebut supervisi, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan manajemen pendidikan, oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang menentukan kebijakan yang akan dilakukannya terutama menyangkut hakikat, tujuan, dan fungsi maupun teknik kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan tepat. Dalam hal ini kebijakan lembaga pendidikan lebih di arahkan kepada pembinaan dan peningkatan kemampuan atau kinerja dalam melaksanakan tugasnya di sekolah atau madrasah.

Melalui berbagai perbaikan dan pengembangan kinerja tersebut, diharapkan usaha pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan peserta didik juga dapat berkembang, secara langsung dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Sesungguhnya pemerintah Indonesia sangat mendukung penuh berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas para guru. Komitmen itu, misalnya, terlihat jelas dalam program sertifikasi guru yang digulirkan beberapa tahun terakhir.

Melalui sertifikasi guru ini, para pendidik di diharapkan termotivasi meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Tentu saja, upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru-guru itu juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Tentu hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-undang Guru dan Dosen Bab IV pasal 16 bahwa Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.⁵

Melalui pendidikan, yang perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan adalah menyangkut kemampuan dan kapasitas dari tenaga pengajar yakni guru. Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka harus dimulai dari gurunya. Kalau kualitas gurunya itu sudah bagus, jelas akan menghasilkan para kader yang berkualitas yang mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah di masa mendatang. Tapi, kalau kualitas guru itu masih rendah, jelas mutu pendidikan kita akan rendah. Kuncinya tidak lain adalah kualitas guru harus ditingkatkan lagi.

⁵PP RI No. 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Pendidikan Nasional* (Bandung : Citra Umbara, 2008), h. 73-74.

Begitu banyak permasalahan dalam dunia pendidikan yang dihadapi oleh bangsa kita, dari permasalahan kekurangan bangunan sekolah, kesejahteraan guru, metode pengajaran, kualitas guru dan masih banyak lagi, yang semuanya itu membuat kualitas pendidikan negara ini tetap rendah dibandingkan negara lain. Berbagai permasalahan pendidikan yang dialami seperti masih rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas guru, masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi, serta kelengkapan sarana prasarana pendidikan. Setidak-tidaknya saat ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi guru yaitu pertama, masalah kualitas/mutu guru, kedua, jumlah guru yang dirasakan masih kurang, ketiga, masalah distribusi guru, dan keempat, masalah kesejahteraan guru.

Secara lebih eksplisit, di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius terutama bagi mereka yang berprestasi. Pada pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.⁶

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian pendahuluan dapat dikemukakan bahwa terkait dengan guru yang berprestasi, guru seharusnya memiliki harkat dan wibawa guru sebagai bukti sudah lulus sertifikasi. Sertifikasi yang dilakukan pemerintah tentunya salah satu bentuk kaminan terhadap kualitas guru. Sangat tidak tepat apabila pemerintah memaksakan program ini menjadi program yang instan, sementara lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi. Jika program ini dipaksakan secara instan, maka sulit diharapkan sebuah perubahan yang signifikan.

Fenomena dalam implementasi pelaksanaan sertifikasi guru seperti munculnya kekhawatiran pelaksanaan sertifikasi dapat meningkatkan dan menjamin peningkatan kualitas guru. Hal ini disebabkan pelaksanaan sertifikasi guru yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 1.

akademik dan kompetensi, ternyata memacu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Kalau bersifat massal, maka dampaknya tentu saja berimbas pada kualitas, dan akhirnya sertifikasi tersebut tidak lebih dari formalitas belaka dan tidak menyentuh substansi.

Pelaksanaan sertifikasi juga memberi peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berefek lanjut pada munculnya konflik dalam profesi guru. Guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik terjadi. Guru yang belum bersertifikat menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun. Guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi juga menjadi permasalahan. Guru yang menempati posisi-posisi tertentu dalam struktur, seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Pelaksanaan sertifikasi guru tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada semua tenaga kependidikan.

Fakta lain juga ditemukannya seorang guru juga harus memahami metode pembelajaran yang paling tepat. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran, maka sulit sekali kualitas pengajaran dan hasil pendidikan tercapai dengan baik sesuai standar kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di samping itu, seorang guru juga hendaknya tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi pada bidang pendidikan juga berbarengan dengan dibuatnya metode pengajaran yang sesuai dengan jenis dan karakter mata pelajaran. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan yang baik terhadap sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru dalam mengajar, dan akhirnya menjadi guru yang profesional.

Kelemahan guru dalam memahami paradigma sertifikasi, terlihat dari melemahnya disiplin dan kinerja. Padahal dengan adanya sertifikasi seharusnya guru semakin meningkatkan disiplin dan kinerjanya dalam mengajar. Sertifikasi memberi dampak kepada paradigma guru akan kedisiplinan dan kinerja. Karena dengan sertifikasi para guru dipacu untuk membuat berbagai persiapan yang berkaitan dengan instrumen sertifikasi. Salah satu instrumen sertifikasi adalah performan guru

itu sendiri yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan sertifikat peran serta dan pelatihan.

Selain itu, kinerja guru juga menjadi instrumen sertifikasi yang dibuktikan dengan rasio jam mengajar selama satu minggu yaitu sebanyak 24 jam pelajaran. Bukti ini memberi pengertian bahwa para guru telah dipacu untuk memberikan kinerja yang terbaik pada madrasah, di samping itu, para guru juga dipacu untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) sendiri atau bersama-sama, yang pada akhirnya akan memacu para guru untuk meningkatkan kemampuan dan performanya dalam menghadapi sertifikasi guru.

Peningkatan kinerja guru yang sudah mengikuti berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan dan kinerja sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya menjadi tolok ukur peningkatan kualitas pembelajaran. Kenyataannya bahwa fasilitas dan tunjangan dari pemerintah tidaklah cukup bagi guru, khususnya pada pesantren atau madrasah yang mampu memberikan motivasi dan peningkatan kompetensi guru dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, hal ini semakin memperlihatkan ketidakjelasan peningkatan kinerja guru tersebut.

Dalam kondisi apa dan bagaimanapun, kinerja guru perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Usaha peningkatan kemampuan guru harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kualitas pembelajaran maupun kualitas pendidikan nasional yang baik pula. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa peran dan tugas guru dalam pembelajaran sangat strategis, dan mungkin tidak tergantikan oleh apapun. Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan peran strategis guru adalah :

1. Murphy (1992), menyatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri serta tidak bergantung pada inisiatif kepala sekolah dan supervisor.
2. Brand (dalam *Educational Leadership*, 1993), mengatakan bahwa hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran, semua bergantung kepada guru. Tanpa penguasaan materi

dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

3. Cheng dan Wong (1996), berdasarkan hasil penelitiannya di Zhejiang, Cina: melaporkan empat karakteristik sekolah dasar yang unggul (berprestasi), yaitu: (a) adanya dukungan yang konsisten dari masyarakat, (b) tingginya derajat profesionalisme di kalangan guru, (c) adanya tradisi jaminan kualitas atau quality insurance dari sekolah, dan (d) adanya harapan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi.
4. Supriadi (1998), mengungkapkan bahwa mutu pendidikan yang dinilai dari prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh guru, yaitu 34% pada negara-negara berkembang, dan 36% pada negara industri.
5. Jalal dan Mustafa (2001), menyimpulkan bahwa komponen guru sangat mempengaruhi kualitas pengajaran melalui: (a) penyediaan waktu yang lebih banyak pada siswa, (b) interaksi dengan siswa dengan frekuensi yang lebih intens atau sering, (c) tingginya tanggung jawab mengajar dari guru. Karena itu, baik buruknya suatu sekolah sangat bergantung pada peran dan fungsi guru.

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian tersebut, setidaknya terdapat tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran, yaitu:

- 1) Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran
- 2) Kurangnya keterampilan dalam mengelola kelas
- 3) Rendahnya kemampuann melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*)
- 4) Rendahnya motivasi berprestasi
- 5) Kurang disiplin
- 6) Rendahnya komitmen profesi
- 7) Rendahnya kemampuan dalam manajemen waktu.

Faktor lain yang juga yang dapat dikemukakan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri adalah di sekolah atau madrasah hendaknya disediakan fasilitas belajar yang lengkap sehingga siswa yang belajar dapat meningkatkan minat dan motivasinya. Selain itu juga, fasilitas yang memadai dan

dapat digunakan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat menjadi bekal keterampilan bagi siswa. Ketersediaan fasilitas belajar sangat penting.

Ketersediaan berbagai fasilitas belajar sangat penting bagi lembaga pendidikan sebagai institusi yang mencetak tenaga kerja siap pakai yang tidak saja berorientasi pada dunia kerja, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Secara umum terdapat 4 misi pendidikan yang menjadi sasaran utama yakni: (1) Menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor keunggulan dalam berbagai sektor pembangunan, (2) Mengubah siswa dari status beban menjadi aset pembangunan yang produktif, (3) Menghasilkan tenaga kerja profesional untuk memenuhi tuntutan kebutuhan industrialisasi khususnya tuntutan pembangunan pada umumnya, dan (4) Membekali siswa untuk dapat mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kependidikan. Hal ini dapat dilihat dari masih lemahnya guru memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Terkait dengan hal di atas, kita bisa mencermati tentang adanya beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas guru. Kebijakan akan melahirkan peraturan-peraturan, komitmen terhadap aturan main yang berlaku di setiap organisasi, perusahaan atau suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dalam proses pelaksanaan kegiatannya pun tidak lepas dari kebijakan-kebijakan. Di dalam kebijakan pendidikan biasanya berisi peraturan, hak, kewajiban jenjang karir dan kompensasi yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Guru, karyawan dan elemen yang terdapat di lembaga tersebut terikat dengan apa-apa yang terdapat dalam isi kebijakan yang berlaku tanpa terkecuali.

Dengan demikian kebijakan pendidikan sangatlah penting keberadaannya sebagai payung hukum bagi guru dan tenaga pendidik lainnya yang dapat memotivasi dan meningkatkan kualitas guru dalam menjalankan tugas dan

funksinya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masalahnya seberapa jauh implementasi kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas guru perlu dicermati lebih dalam, termasuk implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudhlatul Hasanah Medan.

B. Identifikasi Masalah

Kenyataan menunjukkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran saat ini masih perlu upaya peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan kebijakan, kompetensi guru dan eksistensi pesantren khususnya pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam proses pembelajaran. Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Guru. Dalam proses pembelajaran merupakan unsur terdepan yang mengusahakan tercapainya tujuan belajar.
2. Eksistensi pesantren. Pengembangan kurikulum, ketersediaan fasilitas dan sarana belajar yang kurang mendukung. Banyak sekolah hanya menggunakan media dan sumber belajar seadanya tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Fasilitas yang dimaksud berkaitan dengan keadaan bangunan sekolah maupun fasilitas yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, misalnya komputer internet dan lain sebagainya.
3. Kebijakan pesantren. Kebijakan pesantren yang mengacu kepada peningkatan kompetensi guru masih kurang dapat dilaksanakan secara optimal.

C. Rumusn Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja program peningkatan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ?

3. Bagaimana kebijakan finansial dalam meningkatkan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ?
5. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala meningkatkan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan program peningkatan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.
2. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.
3. Untuk mendeskripsikan kebijakan finansial dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.
4. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.
5. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

F. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperkaya dan menambah teori-teori yang berhubungan dengan profesional dan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pengembangan teori keilmuan yang berhubungan dengan empat kompetensi guru, yaitu: profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial merupakan hal yang sangat penting dimiliki serta dikuasai guru untuk mendukung tercapainya siswa mandiri dalam proses pembelajaran. Empat kompetensi itu juga menjadi kunci keberhasilan guru melaksanakan proses pembelajaran. Baik tidaknya suatu pembelajaran akan sangat ditentukan oleh penguasaan dan penerapan empat kompetensi tersebut.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pengembangan sekaligus penguatan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan kompetensi guru dan proses pembelajaran. Pengembangan teori-teori keilmuan yang berhubungan dengan kompetensi guru masih sangat lemah/rendah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
2. Pengembangan teori keilmuan yang berhubungan dengan program in service dan pelatihan-pelatihan. Kompetensi guru menjadi dasar bagi terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Karena kompetensi berkaitan dengan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Pengujian teori-teori tersebut dimaksudkan untuk perlakuan (*treatment*) yang sesuai bagi para guru sebagai upaya peningkatan kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Manfaat praktis penelitian ini ditujukan kepada:

1. Pengurus pesantren dalam meningkatkan perhatian terhadap pengembangan kompetensi guru dan hal-hal yang terkait dengan kompetensi itu sendiri.
2. Para guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.
3. Peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan kompetensi guru dan proses pembelajaran dengan berbagai aspeknya yang lebih mendalam dan hasil penelitian yang lebih sempurna.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang implementasi kebijakan peningkatan kompetensi gurus udah banyak menarik perhatian para peneliti. Terdapat beberapa penelitian hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan mempunyai kemiripan dengan fokus masalah penelitian yang akan dilakukan ini. Ibrohim melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Model Implementasi Lesson Study dalam Kegiatan MGMP Terhadap Peningkatan*

Kompetensi Guru dan Hasil Belajar Biologi Siswa”.⁷ Ibrohim meneliti tentang berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dan kualitas pendidikan, berbagai pelatihan guru dalam jabatan (In-Service Teacher Training/INSET) di Indonesia yang dirasakan belum secara signifikan meningkatkan kemampuan guru dan kualitas pendidikan, implementasi *lesson study* melalui Program SISTTEMS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, dan perlunya menemukan model implementasi *lesson study* yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dan kualitas pembelajaran.

Hasil penelitian mengemukakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam MGMP Sains di Kabupaten Pasuruan sebelum implementasi *lesson study* telah sesuai dengan tujuan dan fungsi MGMP namun pola pelaksanaan belum konsisten dan keefektifannya dalam meningkatkan kemampuan masih rendah. Model implementasi *lesson study* dalam kegiatan MGMP Sains-biologi SMP di Kabupaten Pasuruan berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan pemahaman teknik edukatif guru, kemampuan mengajar, persepsi dan sikap guru terhadap MGMP, serta peningkatan hasil belajar biologi siswa, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penguasaan konsep biologi guru, motivasi berprestasi guru, serta minat, sikap dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan agar dalam upaya meningkatkan kemampuan guru berbasis MGMP memilih model implementasi *lesson study* yang dipadu dengan portofolio. Penyusunan portofolio setelah melaksanakan *lesson study* dapat meningkatkan kemampuan merefleksi, mengembangkan metakognisi dan mendorong guru belajar secara mandiri untuk memecahkan masalahnya.

Selanjutnya juga ditegaskan telah dilakukan tiga model implementasi *lesson study* di tiga MGMP wilayah di Kabupaten Pasuruan, yakni: (1) implementasi *lesson study* tanpa dipadu dengan kegiatan lain, (2) implementasi *lesson study* yang dipadu dengan penyusunan portofolio hasil *lesson study* oleh guru, dan (3) implemetasi *lesson study* yang dipadu dengan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

⁷Ibrohim, *Pengaruh Model Implementasi Lesson Study dalam Kegiatan MGMP Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru dan Hasil Belajar Biologi Siswa* (Disertasi, Program Pascasarjana UM, 2009).

secara kolaboratif setelah pelaksanaan *lesson study* di MGMP. Berkaitan dengan latar belakang tersebut dirumuskan masalah utama penelitian.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan hanya menegaskan pada pelaksanaan MGMP dalam pembinaan peningkatan kompetensi guru. Dalam hal ini untuk peningkatan kompetensi guru tidak hanya dilakukan melalui MGMP tetapi masih banyak program pendidikan dan pelatihan yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran untuk lebih mampu dalam mengelola pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'sud yang berjudul "*Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah, Motivasi dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru Serta Implikasinya Pada Kompetensi Lulusan (Survei Pada MTs Negeri di WKPP III Provinsi Jawa Barat)*".⁸ Ma'sud meneliti dan menganalisis tentang kompetensi pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, motivasi dalam diri guru untuk pelaksanaan pembelajaran dan kaitannya terhadap peningkatan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menguji keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa kemampuan manajerial yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah dan madrasah memiliki kaitan secara signifikan terhadap motivasi dan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi bagi pimpinan dapat menjadi standar ukur dalam mengelola lembaga pendidikan atau sekolah sehingga dengan kompetensi itu akan memberikan dampak terhadap beberapa komponen lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini kompetensi pimpinan dalam mengelola pendidikan termasuk dalam mengelola tenaga pendidik akan berdampak pada peningkatan dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Berarti kompetensi kepala sekolah berhubungan secara signifikan terhadap peningkatan kinerja guru.

⁸Ma'sud, *Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah, Motivasi dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru Serta Implikasinya Pada Kompetensi Lulusan (Survei Pada MTs Negeri di WKPP III Provinsi Jawa Barat)* (Disertasi, Program Pascasarjana UNPAS, 2013).

Hasil penelitian ini secara keseluruhan hanya menegaskan kompetensi kepala sekolah selaku pimpinan dalam lembaga pendidikan, bukan menegaskan pada upaya peningkatan kompetensi guru atau beberapa program dan upaya yang sudah dilakukan dalam pembinaan kompetensi guru dengan tujuan peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Penelitian yang dilakukan Agustinawati yang berjudul “*Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Deli Serdang*”.⁹ Agustinawati meneliti tentang beberapa program pemerintah dalam pembinaan kompetensi guru pada pelaksanaan kurikulum 2013, upaya dalam peningkatan kompetensi guru pada pelaksanaan kurikulum 2013, kendala serta upaya yang dilakukan dalam pembinaan kompetensi guru pada pelaksanaan kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni mengkaji data-data kualitas (konsep, pemikiran dan tindakan) dan mendeskripsikannya apa adanya.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa perumusan program kebijakan peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang adalah peningkatan Kualifikasi Pendidikan, penyetaraan dan sertifikasi, pendidikan dan pelatihan kompetensi, dan supervisi pendidikan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada pelaksanaan kurikulum 2013 di SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang adalah menetapkan tujuan pelaksanaan, kompetensi, dan menyusun materi pelatihan.

Pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat dikemukakan adanya kendala sekaligus upaya mengatasinya. Kendala dalam pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang adalah *mindset* guru terhadap Kurikulum 2013, perubahan *teacher centered* ke *student centered*, moral spiritual, budaya membaca dan meneliti, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, kemampuan memanfaatkan IT, dan keaktifan dalam mengikuti MGMP.

⁹Agustinawati, *Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Deli Serdang* (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Hasil penelitian ini secara keseluruhan hanya menegaskan pada pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan kurikulum 2013. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam meningkatkan kompetensi guru bukan hanya untuk melaksanakan kurikulum 2013 tetapi secara keseluruhan tentunya adalah untuk meningkatkan mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Penelitian yang dilakukan Ade Cahyana yang berjudul “*Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menghadapi Sertifikasi*”.¹⁰ Ade Cahyana meneliti tentang pelaksanaan pembinaan kompetensi guru yang mendukung kinerja guru dan upaya untuk membantu guru dalam menghadapi sertifikasi guru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni mengkaji data-data kualitas (konsep, pemikiran dan tindakan) dan mendeskripsikannya apa adanya.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa sertifikasi guru dinilai sebagai salah satu kebijakan reformasi pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Keluarnya Undang-Undang Nomor 14/2006 tentang Guru dan Dosen adalah merupakan tonggak sejarah tentang bagaimana guru dan dosen diakui sejajar sebagai pekerja profesi sebagaimana pula dokter, insinyur, atau profesi lainnya. Hal ini akan mengubah opini publik terhadap guru menjadi semakin positif, selain juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, juga akan menarik minat orang-orang yang potensial dan berkualitas untuk menjadi guru, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berwibawa. Berdasarkan elaborasi aspek-aspek profesi guru, sangat disarankan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, satu sisi mampu meningkatkan kualitas mengajar mereka sebagai guru, di sisi lain dapat memberi peluang bagi mereka meningkatkan kemampuan profesional sekaligus menambah kredit akumulatif mereka untuk kepentingan sertifikasi.

¹⁰Ade Cahyana, *Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menghadapi Sertifikasi* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 1, 2010, h. 85-91).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Cahyana secara keseluruhan hanya menegaskan pada peningkatan kompetensi guru yang diarahkan pada keberhasilan guru dalam menghadapi sertifikasi. Program pembinaan kompetensi guru dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja guru mengajar atau peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan guru pada proses pembelajaran di kelas.

Penelitian yang dilakukan Nurhaidah yang berjudul “*Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas di Sekolah Dasar*”.¹¹ Nurhaidah meneliti tentang pengembangan kompetensi guru sebagai sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan pelatihan sehingga benar-benar membantu guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran dan fenomena yang terjadi dilapangan kemudian disimpulkan. Adapun yang menjadi subjeknya adalah guru yang diambil secara acak. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembangunan bangsa dan negara dewasa ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu melalui pendidikan sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tersebut. Kompetensi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh kimpetensi mereka tetapi juga kompetensi semua yang terkait dalam mengatur semua sumber daya yang tersedia.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan hanya menegaskan pada pelaksanaan pengembangan kompetensi guru dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD). Pelaksanaan pengembangan kompetensi guru tidak ditegaskan secara umum untuk seluruh sekolah dalam berbagai tingkatan tetapi lebih kepada pengembangan kompetensi guru sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar.

¹¹Nurhaidah, *Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas di Sekolah Dasar* (Jurnal Pesona Dasar (PGSD) Vol. 2 No.3, 2014, h. 13-26).

G. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, secara sistematis dimulai dari berisikan Bab I pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya adalah pembahasan pada Bab II yaitu landasan teoritis, berisikan tentang implementasi kebijakan mengemukakan sub pembahasan yaitu pengertian Implementasi Kebijakan, konsep implementasi kebijakan, dan faktor-faktor mempengaruhi kebijakan. Pembahasan kompetensi guru mengemukakan sub pembahasan yaitu pengertian kompetensi, karakteristik kompetensi, kategori kompetensi dan konsep kompetensi guru. Pembahasan pesantren mengemukakan sub pembahasan yaitu pengertian pesantren, tujuan pesantren, sistem pembelajaran pesantren, dan pembinaan pesantren.

Pembahasan pada Pada Bab III tentang metodologi penelitian, berisikan tentang pendekatan penelitian, latar belakang penelitian kualitatif, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, mekanisme dan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan penelitian dan akhir pembahasan pada bab ini adalah mengemukakan pembahasan tentang teknik pencermatan keabsahan data.

Selanjutnya pembahasan pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang temuan umum. Temuan umum berisikan tentang kondisi pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dan temuan khusus mengemukakan tentang program pembinaan kompetensi guru, upaya pembinaan peningkatan kompetensi guru, kebijakan finansial dalam pembinaan kompetensi guru, kendala dalam pembinaan kompetensi guru dan upaya mengatasi kendala pembinaan kompetensi guru di peantren Ar Raudlatul Hasanah Medan. Selanjutnya adalah pembahasan pada Bab V yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.